

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 7 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

ARDHANA RESWARI HASNA PRATISTA
NIM. 14812141057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 7 TAHUN 2015**

Oleh:
ARDIANA RESWARI HASNA PRATISTA
14812141057

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 11 Mei 2018 untuk dijadikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Ratna Candra S. M. Si, Akt.
NIP.19761008 200801 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul:

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 7 TAHUN 2015**




Oleh:

ARDHANA RESWARI HASNA PRATISTA

14812141057

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Mei 2018 dan
dinyatakan lulus

Dewan Penguji

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dhyah Setrorini, M.Si., Ak	Ketua Penguji		8 Juni 18
Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D.	Penguji Utama		7 Juni 18
Dr. Ratna Candra S, M. Si, Akt	Sekretaris Penguji		8 Juni 18

Yogyakarta, 21 Juni 2018

Fakultas Ekonomi

Dekan.


Dr. Sugiharsono, M. Si

NIP. 19550328 198303 1 0029

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardhana Reswari Hasna Pratista
NIM : 1481211057
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Pada
Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Penulis,



Ardhana
Ardhana Reswari HP

NIM. 1481211057

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu saya.

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* PADA KEPATUHAN
PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO. 7 TAHUN 2015**

Oleh:

Ardhana Reswari Hasna Pratista
14812141057

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan sektor utama selama tahun 2015 sampai 2016 yang didapat dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan sebanyak 21 perusahaan memenuhi kriteria kelengkapan data akhirnya 42 laporan keuangan tahunan yang dipakai dalam penelitian ini. Metode statistika yang digunakan adalah regresi panel.

Dari analisis yang dilakukan komite audit, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi, sementara kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Kata kunci: *corporate governance*, pengungkapan, transaksi pihak berelasi

***THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE TO
RELATED PARTY TRANSACTION DISCLOSURE BASED ON
STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD
(PSAK) NUMBER 7 YEAR OF 2015***

by:

Ardhana Reswari Hasna Pratista
14812141057

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance to the related parties transactions disclosure. The independent variables in this study are audit committee, institutions ownership, management ownership, and independent commissioner. The dependent variable in this research is the related parties transaction disclosure.

This type of research is quantitative research using secondary data of annual financial statements from major sector companies during 2015 to 2016 obtained from Indonesia Stock Exchange. The sampling technique that used in this research is purposive sampling and that are 21 companies that meet the criteria as the sample and finally 42 annual reports used in this analysis. The statistical method used in this study is panel regression.

The analysis showed that audit committee, ownership of management, and independent commissioner have a significant influence to related party transactions disclosure, but Institutional ownership has no influence to related party transactions disclosure.

Keywords: *corporate governance, disclosure, related party transaction*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Pada Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015”. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi.
3. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta dan pembimbing akademik Akuntansi B 2014 yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
4. Dr. Ratna Candra S, M. Si, Akt, dosen pembimbing yang telah sabar memberikan saran dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam masa belajar.
6. Keluarga penulis: Bapak, ibu, dan saudara penulis; yang memberi kasih sayang, dorongan, dan doa.

7. Teman-teman terdekatku; Hayuningrum, Khoirunisa, Rahayu, Aspriliadita, Apriyana, Widasari, Syifa Rahman, dan teman-teman Akuntansi B 2014

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kritik yang membangun dan pendapat dari pembaca diharapkan oleh penulis demi sempurnanya penelitian ini.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,



Ardhana Reswari H.P

NIM. 14812141057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Penelitian	12
D. Rumusan Masalah Penelitian	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan	28
C. Kerangka Berpikir.....	33
D. Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	44
F. Metode Analisis Data Penelitian.....	44
G. Teknik Analisis Data Penelitian.....	45
1. Uji Spesifikasi Model	46

2.	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.	Uji Signifikansi.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
A.	Deskripsi Data Penelitian.....	53
B.	Statistik Deskriptif	53
C.	Uji Spesifikasi Model	58
1.	Uji Chow.....	58
2.	Uji Lagrange Multiplier	59
3.	Uji Hausman	59
D.	Uji Asumsi Klasik.....	60
1.	Uji Linearitas	60
2.	Uji Normalitas.....	61
3.	Uji Multikolinearitas.....	61
4.	Uji Heteroskedastisitas	63
5.	Uji Autokorelasi.....	64
E.	Uji Signifikansi	65
1.	Koefisien Determinasi (R^2).....	65
2.	Uji Statistik t.....	65
3.	Uji Statistik F.....	69
F.	Pembahasan.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Keterbatasan Penelitian.....	77
REFERENSI.....		79
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi	54
2. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Komite Audit.....	55
3. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional	56
4. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Manajemen.....	57
5. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Komisaris Independen .	57
6. Hasil Uji Chow.....	59
7. Hasil Uji Lagrange Multiplier	59
8. Hasil Uji Hausman	60
9. Uji Linearitas.....	60
10. Uji Normalitas	61
11. Hasil Uji Multikolonieritas	62
12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
13. Hasil Uji Model GLS	64
14. Hasil Uji R^2	65
15. Hasil Uji t	66
16. Hasil Uji F	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Prosedur Penilaian Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi	83
2. Daftar Perusahaan Sampel	84
3. Hasil Data Olahan Perusahaan Sampel tahun 2015	85
4. Data Perusahaan Sampel tahun 2016	86
5. Data Rangkuman	87
6. Deskripsi Statistik dan Hasil Regresi Panel	89
7. PSAK No 7 Tahun 2015	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat 2 bentuk umum struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Perbedaan dari kedua struktur tersebut adalah pada proses pengambilan keputusan. Pada struktur tersebar, pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Sedangkan pada struktur terkonsentrasi, terdapat pemegang saham yang dapat mengendalikan atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri (Sari, 2014).

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham memilih dan melantik manajer yang bekerja untuk kepentingan pemegang saham pengendali sedangkan pemegang saham lain hanya memiliki sedikit kewenangan dalam pemilihan manajer. Pada perusahaan yang dikontrol oleh keluarga tertentu, direktur non eksekutif umumnya adalah anggota keluarga.

Perusahaan di Indonesia pada umumnya memiliki grup perusahaan yang berhubungan karena kepemilikan saham ataupun karena keterkaitan kepentingan baik antara perusahaan induk (*parent company*) dan anaknya ataupun antar cabang perusahaan (*sister company*) atau yang disebut pula sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan (*related parties*) (Indah Rini: 2014).

Hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) merupakan suatu karakteristik (*feature*) normal dari perdagangan dan bisnis. Perusahaan sering melaksanakan bagian dari kegiatan mereka misalnya melakukan pembelian dan penjualan melalui perusahaan anak, atau perusahaan asosiasi. Dalam kegiatan transaksi tersebut perusahaan induk memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investee melalui adanya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan anak atau perusahaan yang termasuk dalam grup asosiasinya.

Sari (2014) mengungkapkan struktur kepemilikan keluarga dan grup pada perusahaan di Indonesia memicu terjadinya transaksi pihak berelasi. Struktur kepemilikan keluarga grup pada perusahaan publik di Indonesia menyebabkan hampir seluruh perusahaan publik di Indonesia melakukan transaksi pihak berelasi. Pemegang saham pengendali atau terkonsentrasi melakukan transaksi pihak berelasi lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali atau tersebar. Pada tahun 2008, perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi mempunyai rata-rata penjualan pada pihak berelasi sebesar 55% dari nilai aset, nilai tersebut lebih tinggi dibanding perusahaan yang tersebar, yaitu sebesar 10% dari nilai aset. Hasil tersebut konsisten untuk tahun 2009 dan 2010, bahwa rata-rata penjualan kepada pihak berelasi lebih tinggi pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Rata-rata pembelian dari pihak berelasi pada perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebesar 16,2% dari nilai aktiva. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali, yaitu sebesar 7,9% untuk tahun 2008. Demikian juga pada tahun 2009 dan 2010 rata-rata pembelian dari pihak berelasi lebih tinggi pada perusahaan terkonsentrasi dibanding pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar (Sari, 2014).

Tahun 2008, rata-rata pemberian piutang kepada pihak berelasi pada perusahaan yang terkonsentrasi sebesar 27% dari total aset sedangkan rata-rata pemberian piutang kepada pihak berelasi pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar sebesar 2,4% dari total aset. Demikian juga pada tahun 2009 dan 2010, pemberian piutang kepada pihak berelasi lebih tinggi pada perusahaan terkonsentrasi dibanding perusahaan dengan kepemilikan tersebar (Sari, 2014).

Beberapa transaksi berelasi bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan pemangku kepentingan perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi untuk pencapaian kesejahteraan grup. Namun, dalam beberapa kondisi transaksi pihak berelasi dapat membuka peluang timbulnya tujuan oportunistik yakni penyalahgunaan transaksi pihak berelasi yang akan merugikan pemegang saham minoritas dan hanya menguntungkan pemegang saham pengendali, penyalahgunaan yang terjadi dapat mendorong terjadinya *tunneling* atau mengambil keuntungan

pribadi dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non pengendali (Sari, 2014).

Menurut Heni Werdhi (2015) transaksi pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengungkapan tersebut merupakan kunci bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan dan memahami dampak transaksi pada perusahaan, termasuk adanya transfer kekayaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 7 Tahun 2015, menyatakan bahwa tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa keputusan perusahaan telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut. Pernyataan tersebut diterapkan dalam:

- a. Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
- b. Mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi.
- c. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b).
- d. Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk atau investor

dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investee yang disajikan sesuai dengan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian atau PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri. Pernyataan ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.

Pengungkapan menurut Evans (2003) adalah penyediaan informasi dalam laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan juga dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, seperti investor. Informasi terkait kondisi dan kinerja perusahaan merupakan komposisi yang penting bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Pengungkapan berperan untuk mengurangi permasalahan yang timbul dalam hubungan antara manajemen dan investor (Healy: 2001; Fitri: 2012). Pengungkapan transaksi pihak berelasi ini menurut Arshad (2009) adalah untuk menyediakan informasi mengenai praktik transaksi pihak berelasi dan hubungan dengan investor luar dan *stakeholder* lainya dan sebagai bagian dari gerakan *corporate governance* dan konvergensi dari *International Financial Reporting Standar* (IFRS).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012) mekanisme *corporate governance* juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Konsep *corporate governance* pada intinya adalah *internal balance* dan *external balance*. *Internal balance* berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme operasional. *External balance* berkaitan

dengan pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan yang salah satu caranya dengan memperluas pengungkapan transaksi perusahaan.

Selain itu *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan komponen penting lainnya yang harus diperhatikan perusahaan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), latar belakang kebutuhan atas GCG, dari latar belakang praktis, dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* akibat *market crash* pada tahun 1929. Dari latar belakang akademis, kebutuhan *corporate governance* timbul berkaitan dengan *agency theory* dikarenakan perusahaan menginginkan suatu proses pengawasan terhadap keputusan yang dilakukan manajemen agar tidak terjadi penyimpangan. Implementasi dari *corporate governance* diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Saputra (2013), *corporate governance* diharapkan

mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh, dan juga akan bermanfaat untuk mempermudah memperoleh modal, *cost of capital* jadi lebih rendah, dan berpengaruh baik terhadap harga saham.

Menurut Chintya (2014) krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang ada di Indonesia berkembang menjadi krisis *multidimensi* yang berkepanjangan, krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. *Corporate covernane* mendorong perusahaan melakukan operasinya secara etis karena dianggap dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder*. Adanya penerapaa *Good Corporate Governanve* ini akan membawa pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan dari transaksi pihak berelasi yang disalahgunakan sangat tinggi, sehingga pemantauan dan penertiban transaksi pihak berelasi adalah menjadi prioritas utama reformasi *corporate governance* di Indonesia.

Komite audit adalah salah satu unsur *corporate governance*. Menurut Sutedi (2012:161) komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum, serta memastikan perusahaan telah menjalankan usahanya secara etis dan bermoral. Jadi semakin banyak komite audit maka pengawasan terhadap pengungkapan semakin baik sehingga pengungkapan akan semakin baik

pula. Hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu unsur yang independen untuk mengawasi pihak-pihak yang akan melakukan pengungkapan.

Unsur *Corporate governance* lainnya adalah struktur kepemilikan. Menurut Barako (2007) struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2012) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah perusahaan. Menurut Gabriella (2011) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajemen). Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Pada penelitian ini mekanisme struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen. Kepemilikan

institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Beiner *et al*, 2003). Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Boediono, 2005). Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan.

Mekanisme struktur kepemilikan selanjutnya adalah kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen and Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan melakukan praktik pengelolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham. Praktek tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan informasi yang luas.

Unsur *corporate governance* lainnya yakni komisaris independen. Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan

yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun (Dananjaya, 2014).

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang benar (Lo, 2011; Werdhi, 2015). Peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005; Dananjaya, 2014). Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen yang berada di perusahaan, akan berdampak pada pengawasan terhadap laporan keuangan yang dianggap akan lebih ketat dan objektif.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yang akan dijabarkan dalam 4 unsur yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen berkaitan dengan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi, maka penulis memilih judul “Pengaruh *Corporate Governance* pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

B. Identifikasi Masalah

1. Struktur kepemilikan keluarga dan grup pada perusahaan di Indonesia menyebabkan hampir seluruh perusahaan publik di Indonesia melakukan transaksi pihak berelasi
2. Pemegang saham pengendali atau terkonsentrasi melakukan transaksi pihak berelasi lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali atau tersebar.
3. Transaksi pihak berelasi dapat membuka peluang timbulnya tujuan oportunistik yakni penyalahgunaan transaksi pihak berelasi yang akan merugikan pemegang saham minoritas dan hanya menguntungkan pemegang saham pengendali.
4. Rendahnya *disclosure* membuat masyarakat akan sulit menilai, apakah perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi untuk tujuan ekonomis, atau untuk tujuan oportunistik. Pengguna laporan keuanganpun juga akan sulit untuk menentukan keputusan.
5. Transaksi pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengungkapan tersebut merupakan kunci bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan dan memahami dampak transaksi pada perusahaan, termasuk adanya transfer kekayaan.
6. Krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang ada di Indonesia antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten. Kerugian yang ditimbulkan dari transaksi pihak berelasi yang di salah gunakan sangat tinggi, sehingga

pemantauan dan penertiban transaksi pihak berelasi adalah menjadi prioritas utama reformasi *corporate governance* di Indonesia.

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini terutama pada mekanisme *corporate governance* sebagai variabel-variabel independen nya, yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris independen dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah *corporate governance* berpengaruh pada kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015. *Corporate governance* di proksikan dengan beberapa unsur, maka dapat dijabarkan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015?

3. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan standar PSAK No. 07 Tahun 2015?
5. Apakah komite audit, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajemen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015.

4. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015.
5. Untuk menguji pengaruh komite audit, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 07 Tahun 2015?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang berkaitan dengan transaksi pihak bereasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga regulasi dalam rangka memberikan hak dan kesetaraan pemegang saham.

b. Bagi Manajemen

Sebagai sumber informasi dari pengaruh *corporate governance* terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan perusahaan.

c. Bagi investor

Sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan investasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional, dalam hal ini harus terdapat pemisahan antara *Board of Directors* sebagai representasi dari pemegang saham yang melakukan fungsi pengendalian atas operasional perusahaan dan *Board of Management–CEO* sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan.

Agency theory merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Terjadi konflik kepentingan / *conflict of interest* sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini dimaksudkan pihak manajemen agar pihak pemilik perusahaan menilai kinerja manajemen selama ini baik. Pihak manajemen biasanya cenderung mengambil keputusan dengan tujuan kesejahteraan pribadi.

2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pemerintah Indonesia sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 *Forum*) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS (*International Financial Reporting Standar*). IAI mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan. Adopsi secara bertahap terhadap IFRS telah dilakukan oleh IAI dengan melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan IFRS sehingga perusahaan *go public* wajib mengungkapkan informasi keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi baru atau revisi yang mulai efektif secara bertahap sejak tahun 2008.

Peraturan mengenai pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman

Penyajian Laporan Keuangan serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik.

3. Transaksi Pihak Berelasi

Di Indonesia, pengungkapan transaksi berelasi diatur dalam PSAK No. 7 mengenai Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pihak-pihak dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut PSAK No. 7, kriteria dari pihak-pihak yang berelasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh suatu persentase penyertaan modal tertentu. Di samping itu, standar ini juga tidak membatasi bentuk hubungan keluarga yang seperti apa, yang dianggap mempunyai hubungan istimewa.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, definisi dari pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika:
 - 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - 2. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor.
 - 3. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu):
 - 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - 2. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - 6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

7. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

4. Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mengarah pada praktik-praktik yang merugikan bagi pemegang saham minoritas. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas tersebut adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi (*related party transaction* atau RPT) (Chintya; 2014). Untuk menghindari transaksi pihak berelasi yang cenderung merugikan pemegang saham minoritas, maka terdapat Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang harus dilaporkan pada publik. Peraturan ini memberi pedoman bagi para emiten atas pengungkapan dan pelaporan transaksi yang memiliki sifat benturan kepentingan, termasuk pengungkapan dan pelaporan atas transaksi pihak berelasi.

Transaksi pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan, karena pengungkapan tersebut merupakan kunci bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan dan memahami dampak transaksi pada perusahaan, termasuk adanya transfer kekayaan (Kohlbeck dan Mayhew, 2009; Werdhi, 2015). Pengungkapan Transaksi pihak berelasi ini juga terkait dengan kepentingan perpajakan, karena pada umumnya transaksi pihak berelasi digunakan untuk penghindaran pajak.

Demi mengurangi perilaku oportunistik pada transaksi pihak berelasi, meningkatkan keterbukaan dan melaksanakan sistem pengawasan yang lebih efektif, maka dikeluarkan aturan tentang transaksi pihak berelasi (Chaghadari, 2011). Transaksi pihak berelasi diatur dalam (PSAK) No. 7 dan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011. Sesuai dengan PSAK No.7 Revisi 2015, transaksi pihak berelasi harus diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi ini menurut Arshad (2009) adalah untuk menyediakan informasi mengenai praktik transaksi pihak berelasi dan hubungan dengan investor luar dengan *stakeholder* lainnya dan sebagai bagian dari gerakan *corporate governance*. Penelitian Utama dan Utama (2014) menunjukkan bahwa besaran transaksi pihak berelasi yang diungkapkan pada laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan tingkat pelaporan transaksi pihak berelasi. Namun, karena *efficient* transaksi pihak berelasi memberikan manfaat pada semua pihak, baik pemegang saham mayoritas (pengendali) maupun pemegang saham minoritas (non-pengendali), maka transaksi pihak berelasi ini tetap akan dilakukan terlepas dari praktik *corporate governance* perusahaan. Di sisi lain, transaksi pihak berelasi yang bersifat oportunistik menguntungkan pemegang saham pengendali, tetapi merugikan pemegang saham non-pengendali sehingga praktik *corporate*

governance seharusnya dapat mengurangi transaksi pihak berelasi yang bersifat oportunistik (Chintya; 2014).

5. *Corporate Governance*

Menurut Nuryaman (2008) *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Herawaty, 2008). *Corporate governance* juga adalah konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasarkan pada kerangka peraturan (Nasution, 2007).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun kepemilikan institusional sebagai indikator mekanisme *corporate governance*.

Praktik *corporate governance* (CG) merupakan salah satu mekanisme di dalam perusahaan guna meminimalisasi masalah keagenan. Sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) maka praktik *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi *asymmetric information*, termasuk peningkatan keterbukaan dan transparansi laporan keuangan. Utama (2008) menegaskan bahwa jika suatu perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* dengan sesuai maka praktik-praktik transaksi pihak berelasi yang bersifat oportunistik tidak terjadi. Hal ini dikarenakan praktik-praktik transaksi pihak berelasi yang menyesatkan tidak sesuai dengan prinsip *corporate governance*.

Praktik *corporate governance* diperlukan untuk mencegah tindakan transaksi pihak berelasi yang merugikan pemegang saham dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah transaksi pihak berelasi yang bersifat oportunistik semakin menurun dengan mekanisme praktik *corporate governance* yang kuat (Gordon: 2004; Chintya: 2014). Sementara, transaksi pihak berelasi yang bersifat oportunistik cenderung dilakukan jika praktik *corporate governance* perusahaan lemah. (Kohlbeck dan Mayhew: 2004; Chintya: 2014)

Corporate governance dapat diprosikan dengan beberapa unsur diantaranya yaitu yang akan dibahas pada penelitian ini adalah struktur

kepemilikan yang akan didefinisikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dan unsur lainnya yakni komite audit dan komisaris independen.

a. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan proporsi pemegang saham di dalam perusahaan yang dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki pemilik dibagi dengan seluruh saham perusahaan. Proporsi dalam kepemilikan ini akan menentukan jumlah minoritas dan mayoritas kepemilikan saham dalam perusahaan (Abdurrahman, 2005; I.B Made Puniyasa, 2016).

Dalam Kompasiana.com dipaparkan, sebuah studi oleh Claessens dan Fan mengungkapkan fakta menarik dari kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia. Perusahaan di Amerika dan Eropa umumnya dimiliki oleh berbagai pihak secara *diffusely*, sementara perusahaan di Asia umumnya dimiliki oleh keluarga. Misal, Toyota Motor Corporation yang secara turun temurun dimiliki oleh keluarga Toyota. Tidak hanya itu, keluarga umumnya juga memiliki grup perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan, baik *listed* maupun tidak. Misal, grup Salim Indonesia yang memiliki perusahaan di antaranya Indofood Sukses Makmur dan Indomobil. *Country assessment* yang dilakukan oleh ROSC menemukan bahwa terdapat lima kategori kepemilikan yang umum dijumpai di Indonesia, yakni kepemilikan oleh keluarga sesuai

studi Claessens dan Fan secara grup, kepemilikan oleh negara (BUMN), bank (institusi), kepemilikan asing, dan kepemilikan secara independen bukan bagian dari grup.

Menurut Jensen (1976) dalam I.B Made Puniyasa (2016) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan. Hal ini karena semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula dorongan pihak institusi dalam mengawasi manajemen sehingga memberikan dorongan lebih besar dalam peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

b. Kepemilikan Institusional

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wiranata, 2013).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawas (*monitoring*) yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang

strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Selaras dengan pendapat tersebut, Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi pengungkapan.

c. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pengelola perusahaan (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja perusahaan semakin bagus (Jensen, 1986).

Sejalan pula dengan pendapat yang dipaparkan Jensen dan Meckling (1976) dalam Sari Wulan (2013) kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dan pemegang saham manajemen. Besarnya kepemilikan saham manajerial mengindikasikan kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders* sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin baik (Boediono, 2005; Sari Wulan, 2013).

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat pengawas terhadap kinerja manajer yang bersifat internal. Kepemilikan manajerial harus dapat disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham agar dapat meminimumkan biaya keagenan yang muncul dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol tersebut. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham termasuk mereka sendiri. Kepemilikan manajer yang tinggi tidak hanya memiliki kontrol manajemen namun juga kontrol *votting* dalam perusahaan (Jensen dan Meckling: 1976; Melinda: 2018).

d. Komite Audit

Penciptaan *corporate governance* pada praktik yang ada membutuhkan adanya peran dari komite audit. Komite audit akan memberikan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengelolaan usaha yang sehat melalui peran pengawasan yang dilakukan. Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimilik sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan.

Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha. Adanya Fungsi dari komite audit tersebut membuat ada dorongan untuk berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang terdiri dari: *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency*.

Keberadaan komite audit saat ini mulai diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan yang sehat. Toha (2004) Menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

e. Komisaris Independen

Mekanisme dalam *Corporate Governane* yang lain adalah keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan pada pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Teori keagenan menyarankan bahwa keputusan manajer harus dimonitor oleh pihak independen, yaitu komisaris independen untuk memastikan

bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang benar (Lo, 2011; Werdhi, 2015).

Komisaris independen, sebagai bagian dari dewan komisaris memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap transparansi informasi perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah komisaris independen dihubungkan dengan tingginya kualitas pengungkapan dalam laporan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen pada suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan (Karamanou, 2005; Werdhi, 2015).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Werdhi (Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 4 No. 1 Januari 2015) dengan judul *Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Di Indonesia*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji *corporate governance* dan karakteristik perusahaan dalam luas pengungkapan transaksi pihak berelasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *level of ownership concentration*, persentase komisaris, level diversifikasi perusahaan serta profitabilitas. Variabel dependen dari penelitian ini adalah luas pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Dalam menganalisis efek variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk 2 variabel kontrol yaitu tipe industri dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel, ada 25 perusahaan yang sesuai dengan kriteria sebagai sampel pada penelitian ini dan 90 laporan keuangan digunakan dalam analisis ini.

Metode statistika yang digunakan adalah *multiple linear regression analysis*. Analisis tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai efek

signifikan pada pengungkapan transaksi pihak berelasi. Level diversifikasi perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan transaksi pihak berelasi.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Barbara Gunawan dan Eka Riana Hendrawati (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016) dengan judul Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti juga menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*

pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel mekanisme *corporate governance* memengaruhi tingkat kepatuhan dengan konvergensi pengungkapan mandatory IFRS adalah jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Variabel kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris, dan proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi IFRS.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Wulan (Universitas Kristen Satya Wacana, 2013) mengambil judul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan IFRS dan Pengungkapan Sukarela serta mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diidentifikasi sebagai kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik,

jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian ini menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan *size* sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 106 perusahaan yang menjadi sampel. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda.

Rata-rata tingkat pengungkapan IFRS 73,65% dan pengungkapan sukarela 68,61% serta hasil uji regresi menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* memenuhi tingkat pengungkapan IFRS dan pengungkapan sukarela. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah jumlah rapat komite audit. Variabel lainnya yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, profitabilitas, *leverage*, dan *size* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Candra Sari (Universitas Negeri Yogyakarta) dan Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc (Universitas Gadjah Mada) dengan judul *Current Asset Tunneling Through Related Party Transaction: Empirical Evidence In Indonesia*.

Penelitian ini berfokus pada pengambilalihan pemegang saham non-pengendali melalui aktivitas tunneling. Penelitian mengenai tunneling sampai saat ini masih menemui hambatan dalam

pengukuran karena sulit dibuktikan, meskipun aktivitas *tunneling* terjadi dalam praktik bisnis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengembangkan model penilaian *tunneling*. Studi ini mendefinisikan *tunneling* sebagai terkait transaksi pihak berelasi yang digunakan untuk menyalurkan sumber daya perusahaan publik demi keuntungan pemegang saham pengendali.

Studi ini berfokus pada *tunneling* aset saat ini. Studi ini menemukan bahwa dari perspektif perusahaan yang di *tunneling*, piutang kepada pihak berelasi secara negatif mempengaruhi margin laba perusahaan. Perusahaan yang mengumumkan transaksi pihak berelasi yang terindikasi melakukan *tunneling* mengakibatkan pendapatan negatif selama pengumuman transaksi pihak berelasi. Berdasarkan metode penilaian *tunneling*, Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi *tunneling*, dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar. Perusahaan yang di *tunneling* memiliki kinerja yang lebih rendah daripada yang tidak.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Ahmad dan Ratna Candra Sari (Universitas Negeri Yogyakarta) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan Dengan Rerangka *Integrated Reporting*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* (IR). Pemilihan variabel dalam penelitian ini karena penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2015.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 64 sampel selama dua tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka IR.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

Komite audit yang efektif merupakan komponen utama untuk meningkatkan praktik *corporate governance* perusahaan. Tugas utama komite audit adalah membantu komisaris dalam melaksanakan

tugasnya untuk kepentingan pemegang saham dan membantu meningkatkan monitoring pada proses pelaporan keuangan. Komite audit berperan penting dalam proses seleksi auditor eksternal dan menjamin tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi auditor (Sari, 2014)

Komite audit juga melakukan review terhadap kerangka kontrol internal perusahaan. Komite audit yang baik akan menambah kredibilitas komisaris sebagai badan yang netral dalam menjamin bahwa struktur kontrol internal dijalankan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dapat menjadi alat kontrol yang baik bagi internal maupun eksternal perusahaan dan menjadikan kualitas pengungkapan perusahaan menjadi lebih baik.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

Adanya pengawasan dari pemegang saham akan meminimalisir perilaku oportunistik manajer karena manajer akan merasa diawasi dalam setiap tindakan yang dilakukannya sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan demi mempertahankan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh peranan institusional sebagai alat *monitoring* atau kontrol dalam aktivitas manajemen perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

Adanya kepemilikan manajerial menyebabkan pihak manajemen secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmuran dirinya. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan manajemen rendah akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan ekspropriasi dibanding dengan perusahaan dengan kepemilikan manajemen tinggi.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

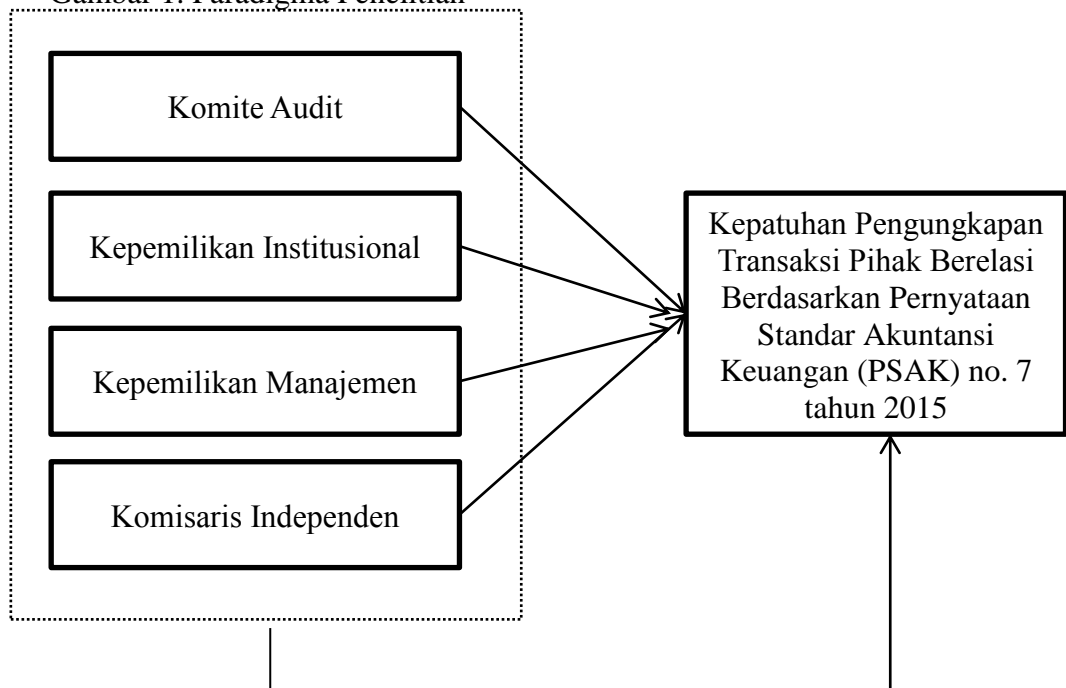
Komisaris independen memiliki tugas sentral dalam membantu dewan komisaris memenuhi fungsi pengawasan transaksi pihak berelasi. Keputusan independen merupakan hal utama dalam mengawasi transaksi pihak berelasi dan meyakinkan bahwa transaksi tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham.

Dahya et al., (2017) menyatakan Proporsi komisaris independen yang tinggi pada perusahaan berhubungan dengan rendahnya

kemungkinan melakukan transaksi pihak berelasi. Dechow et al., (1996) juga berpendapat selaras yakni proporsi dewan komisaris berhubungan negatif dengan tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat menjadi kekuatan penyeimbang bagi pengaruh pemegang saham pengendali, sehingga praktik *corporate governance* menjadi semakin baik (Sari, 2014).

Berdasarkan telaah teori yang sudah dipaparkan, peneliti mengindikasikan *corporate governance* yang di proksikan dengan komite audit, kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, dan dewan komisaris sebagai variabel independen dapat berpengaruh secara positif pada kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 sebagai variabel dependen. Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

- H1 : Terdapat pengaruh positif Komite Audit terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015
- H2 : Terdapat pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015
- H3 : Terdapat pengaruh positif Kepemilikan Manajemen terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

H4 : Terdapat pengaruh positif Komisaris Independen terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

H5 : Terdapat pengaruh positif Komite Audit, Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka (Sugiyono, 2013: 6). Penelitian ini merupakan penelitian *ex-post facto* yakni penelitian yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana data disajikan dalam bentuk angka dan analisis berdasarkan analisis statistik. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan model analisis regresi panel/PLS.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laman Bursa Efek Indonesia dengan alamat <http://www.idx.co.id>. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2017 sampai Maret 2018.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan pada sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016.

b. Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sample*. Penentuan sampel dilakukan dengan beberapa tahapan yang melihat pada beberapa kriteria yaitu:

1. Perusahaan non keuangan yang listed di BEI selama tahun 2015-2016. Sebaiknya penelitian membedakan dan memilih untuk fokus pada salah satu kelompok usaha yaitu keuangan atau non keuangan agar data kinerja tidak menjadi bias. Dipilihnya perusahaan non keuangan karena jumlah perusahaan non keuangan lebih dominan.
2. Perusahaan termasuk dalam perusahaan sektor utama yakni perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian dikarenakan kedua sektor tersebut merupakan sektor penghasil bahan baku yang dinilai memiliki kemungkinan lebih tinggi terjadinya transaksi berelasi dengan tujuan oportunistik.
3. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit.
4. Merupakan perusahaan non BUMN, hal tersebut diatur dalam PSAK No 07 Tahun 2015 Paragraph 28, karena terdapat perbedaan

peraturan pengungkapan antara perusahaan BUMN dan non BUMN.

5. Memiliki informasi tentang pengungkapan transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*).

Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka terdapat 42 sampel perusahaan dalam 2 tahun yaitu tahun 2015 dan 2016.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Hendikson: 1992; Widiastuti: 2002). Pengungkapan memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi, maka kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari keterbukaan dan transparansi.

Kepatuhan merupakan kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto: 2011). Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, perusahaan telah mentaati standar akuntansi keuangan. Lebih lanjut, laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan keuangan (Bapepam).

Pengukuran pengungkapan transaksi pihak berelasi yakni dengan teknik *scoring*, yaitu item yang diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0. Dari skor pengungkapan total perusahaan tersebut akan dibandingkan dengan total pengungkapan yang diatur dalam PSAK.

$$PTB = \frac{\text{Nilai pengungkapan}}{\text{Total pengungkapan di PSAK}} \times 100\%$$

2. Komite Audit

Toha (2004) Menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat guna melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Pengukuran variabel komite audit dilakukan dengan menghitung anggota komite audit yang berada pada perusahaan.

3. Kepemilikan institusional

Kepemilikan Institusional adalah persentase saham institusi baik swasta maupun pemerintah di dalam maupun di luar negeri (Sam'ani, 2008). Kepemilikan institusional diproksi dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana

perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun. Dengan demikian, kepemilikan institusional diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar akhir tahun}}$$

4. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pengelola perusahaan (Sujono dan Soebiantoro; 2007). Kepemilikan manajemen diproksi dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Dengan demikian, kepemilikan manajemen diproksikan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajemen} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

5. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Semakin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan pengungkapan perusahaan. (Suhardjanto dan Afni, 2009; Gunawan, 2015).

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) di dalam peraturan pencatatan tentang ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa

menyebutkan tentang rasio komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Pada penelitian ini, pengukuran variabel komisaris independen dilakukan dengan menghitung persentase komisaris independen dari total dewan komisaris.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

F. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Dalam teori ekonometri, data panel merupakan gabungan antara data *cross-section* (silang) dan data *time-series* (deret waktu). Data *cross-section* dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 21 perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada sektor utama. Sedangkan, data

time-series dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari tahun 2015-2016. Analisis data dilakukan dengan bantuan *computer*.

$$PTB = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PTB	:	Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
X ₁	:	Variabel Komite Audit
X ₂	:	Variabel Kepemilikan Institusional
X ₃	:	Variabel Kepemilikan Manajemen
X ₄	:	Variabel Dewan Komisaris
β ₀	:	Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄	:	Koefisien regresi
i	:	Jumlah Perusahaan
t	:	Tahun
E	:	<i>error term</i>

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga metode estimasi, yaitu estimasi *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pemilihan model ini disesuaikan dengan data yang tersedia dan hasil uji estimasi. Sebelum melakukan analisis data regresi langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan uji estimasi model untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Setelah pemilihan model,

langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik dan uji signifikansi untuk menguji hipotesis penelitian.

1. Uji Spesifikasi Model

Sebelum melakukan regresi, langkah yang dilakukan adalah melakukan estimasi model untuk memperoleh model yang paling tepat digunakan. Dalam menentukan model mana yang akan digunakan, maka pengujian yang dilakukan adalah:

a. Uji Chow

Uji spesifikasi model dilakukan dengan tujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji pertama yang dilakukan adalah menggunakan uji Chow. Uji chow digunakan untuk menentukan model yang sebaiknya digunakan. Ada dua pilihan model yaitu model *fixed effect* atau model *commom effect*.

Ho : Common Effect

Ha : Fixed Effect

Apabila hasil uji Chow menghasilkan probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,050 maka model yang digunakan adalah model *common effect*. Sedangkan apabila probabilitas *Chi-Square* yang dihasilkan kurang dari 0,050 maka model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*. Pada saat model yang terpilih adalah *fixed effect* maka diperlukan uji Hausman. Uji Hausman ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya menggunakan *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

b. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* atau model *common effect* yang lebih baik digunakan. Uji ini dilakukan jika pada uji Hausman model yang terpilih adalah *random effect*. Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Random Effect Model*

Uji ini didasarkan pada distribusi *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai Lagrange Multiplier statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *Chi Square* maka H_0 ditolak, sehingga *Random Effect Model* adalah model yang terbaik. Sebaliknya jika nilai Lagrange Multiplier statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik *Chi Square* maka H_0 diterima, sehingga model yang terbaik adalah *Common Effect Model*.

c. Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model akan dianalisis menggunakan model *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Hipotesa yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji Hausman menghasilkan probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari 0,050 maka H_0 diterima sehingga model yang

sebaiknya digunakan adalah *random effect model*. Sedangkan apabila hasil uji Hausman menunjukkan probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari 0,050 maka H_0 ditolak sehingga model yang sebaiknya digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat terdapat linearitas atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, kedua variabel harus diuji dengan menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai sig F tersebut kurang dari 0,050 maka hubungannya tidak linear, sedangkan jika nilai sig F lebih besar dari atau sama dengan 0,050 maka hubungannya linear (Ali Muhson 2009).

b. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *critical ratio skewness*. Data dikatakan normal jika nilai c.r. (*critical ratio skewness*) memiliki syarat $-1,96 < c.r. < 1,96$. Berarti bahwa asumsi normalitas ditolak pada taraf signifikansi 0,050 (Augusty Ferdinand, 2005: 140).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Gujarati (2006: 68), jika koefisien koerelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,800 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,800 maka model bebas dari multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dan satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas.

Adanya sifat heteroskedastisitas dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Umumnya masalah heteroskedastisitas lebih biasa terjadi pada data *cross section* dibandingkan data *time series*.

Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas $< 0,050$ maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai

probabilitas pada setiap variabel $>0,050$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antar variabel. Autokorelasi diartikan sebagai korelasi atau hubungan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*).

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ruang atau waktu dengan kesalahan pengganggu pada ruang atau waktu sebelumnya.

3. Uji Signifikansi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kesalahan atau kebearan dari hipotesis nol dari sampel. Uji signifikansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien ini nilainya antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Semakin besar nilai koefisien maka variabel-variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kata lain

koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linear X.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memperdiksi variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pada tingkat signifikansi 5%, kriteria pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, berarti variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
- 2) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

c. Uji Statistik F

Uji statistik F (Uji F) dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikan 5%, maka hasil pengujian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil analisis data berkaitan dengan pengaruh variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan insitusal, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan sektor publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2016.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia melalui laman resmi www.idx.co.id. Pengambilan sampel perusahaan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan didasarkan kriteria tertentu dan diperoleh 21 perusahaan sektor publik, sehingga dalam periode 2 tahun penelitian diperoleh 42 data yang akan diamati dalam penelitian ini.

B. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang data masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Setiap variabel penelitian yang disajikan deskripsi data yang diperoleh dari data yang telah diolah dengan bantuan *computer*.

1. Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Pengungkapan transaksi pihak berelasi dilakukan dengan membandingkan antara jumlah skor pengungkapan perusahaan dengan total pengungkapan yang diatur dalam PSAK No 7 Tahun 2015.

Hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi	42	0,500	0,800	0,604	0,105

Sumber: Data Diolah

Dari data olahan tersebut menunjukkan variabel Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi pada perusahaan sektor utama memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,604 dan standar deviasi sebesar 0,105. Nilai minimum dari Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi adalah sebesar 0,500. Nilai maksimum Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi sebesar 0,800. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perusahaan yang memiliki skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi tertinggi yaitu sebesar 0,800 dan skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi terendah sebesar 0,500, serta skor rata-rata Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi sebesar 0,604.

2. Komite Audit

Pengukuran komite audit dilakukan dengan melihat jumlah komite audit yang ada pada perusahaan terkait. Hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel komite audit disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Komite Audit

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
Komite Audit	42	1	4	2,928	0,558

Sumber: Data Diolah

Dari data olahan tersebut menunjukkan variabel komite audit pada perusahaan sektor utama memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,928 dan standar deviasi sebesar 0,558. Nilai minimum dari komite audit adalah sebesar 1. Nilai maksimum komite audit sebesar 4. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perusahaan yang memiliki jumlah komite audit tertinggi yaitu sebesar 4 orang dan jumlah komite audit terendah sebesar 1, serta memiliki rata-rata komite audit sebesar 2.928.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional diukur dengan menjumlahkan kepemilikan modal saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan keseluruhan kepemilikan saham. Hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel Kepemilikan Institusional disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Institusional

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
Kepemilikan Institusional	42	0,260	0,907	0,595	0,167

Sumber: Data Diolah

Dari data olahan tersebut menunjukkan variabel Kepemilikan Institusional pada perusahaan sektor utama memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,595 dan standar deviasi sebesar 0,167. Nilai minimum dari Kepemilikan Institusional adalah sebesar 0,260. Nilai maksimum Kepemilikan Institusional sebesar 0,907. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perusahaan yang memiliki persentase Kepemilikan Institusional tertinggi yaitu sebesar 0,907 dan persentase Kepemilikan Institusional terendah sebesar 0,260, serta memiliki rata-rata persentase Kepemilikan Institusional sebesar 0,595.

4. Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen diukur dengan menjumlahkan kepemilikan modal saham yang dimiliki oleh manajemen kunci perusahaan yakni komisaris dan direksi dibandingkan dengan keseluruhan kepemilikan saham. Hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel Kepemilikan manajemen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Kepemilikan Manajemen

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
Kepemilikan manajemen	42	0,00001	0,218	0,037	0,059

Sumber: Data Diolah

Dari data olahan tersebut menunjukkan variabel Kepemilikan manajemen pada perusahaan sektor utama memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,037 dan standar deviasi sebesar 0,059. Nilai minimum dari Kepemilikan manajemen adalah sebesar 0,00001. Nilai maksimum Kepemilikan manajemen sebesar 0,218. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perusahaan yang memiliki persentase Kepemilikan manajemen tertinggi yaitu sebesar 0,218 dan persentase Kepemilikan manajemen terendah sebesar 0,00001, serta memiliki rata-rata persentase Kepemilikan manajemen sebesar 0,037.

5. Komisaris Independen

Komisaris Independen diukur dengan melihat jumlah Komisaris Independen dibandingkan dengan keseluruhan komisaris pada perusahaan. Hasil perhitungan analisis deskriptif atas variabel Komisaris Independen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Variabel Komisaris Independen

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviation
Komisaris Independen	42	0,200	0,570	0,383	0,089

Sumber: Data Diolah

Dari data olahan tersebut menunjukkan variabel Komisaris Independen pada perusahaan sektor utama memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,383 dan standar deviasi sebesar 0,089. Nilai minimum dari Komisaris Independen adalah sebesar 0,200. Nilai maksimum Komisaris Independen sebesar 0,570. Hal tersebut berarti bahwa terdapat perusahaan yang memiliki jumlah Komisaris Independen tertinggi yaitu sebesar 0,570 dan jumlah Komisaris Independen terendah sebesar 0,20, serta memiliki jumlah rata-rata Komisaris Independen sebesar 0,383.

C. Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Uji Chow yaitu pengujian untuk menentukan model *Common Effect* (OLS) atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Kriteria pengambilan keputusan pada Uji Chow adalah jika Probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,050 maka model yang lebih baik adalah *Fixed effect*, dan jika probabilitas F hitung lebih besar daripada 0,050 maka model yang lebih baik adalah *Common effect*.

Dalam perhitungan didapat:

Tabel 6. Hasil Uji Chow

Probabilitas (P)	= 0.001
Keterangan	= $P < 0,050$

Sumber: Data Diolah

Untuk itu, model yang paling tepat menurut perhitungann uji chow adalah *fixed effect*.

2. Uji Lagrange Multiplier

Breusch dan Pagan Lagrangian multiplier test untuk *random effects*:

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier

chibar ²	=6,850
Prob chibar ²	=0,004

Sumber: Data Diolah

Terlihat bahwa probabilitas chibar2 lebih kecil dari alpha 0,050, maka pilihan terbaik adalah *Random Effect*.

3. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika probabilitas Chi square lebih kecil daripada 0,050 maka model yang lebih baik adalah *Fixed effect*, dan Jika probabilitas Chi

square lebih besar daripada 0,050 maka model yang lebih baik adalah *Random effect*.

Dalam perhitungan didapat:

Tabel 8. Hasil Uji Hausman

Chi ²	= -37,400
Probabilitas Chi ²	< 0,000

Sumber: Data Diolah

Untuk itu, model yang paling tepat menurut perhitungan uji hausman adalah *Fixed Effect* karena probabilitas Chi² lebih kecil dari 0,050.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat terdapat linearitas atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, kedua variabel harus diuji dengan menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai sig F tersebut kurang dari 0,050 maka hubungannya tidak linear, sedangkan jika nilai sig F lebih besar dari atau sama dengan 0,050 maka hubungannya linear (Ali Muhson 2009).

Tabel 9. Uji Linearitas

F(11, 26)	1,740
Prob > F	0,120

Sumber: Data Diolah

Dari perhitungan data diatas probabilitas sebesar 0,120 ($P>0,05$) maka hubungannya linear.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *critical ratio skewness*. Data dikatakan normal jika nilai c.r. (*critical ratio skewness*) memiliki syarat $-1,96 < c.r. < 1,96$. Berarti bahwa asumsi normalitas ditolak pada taraf signifikansi 0,050 (Augusty Ferdinand, 2005: 140).

Tabel 10. Uji Normalitas

Variable	Obs	W	v	Z	Prob>z
r	42	0,957	0,995	-0,011	0,504

Sumber: Data Diolah

Dari perhitungan data diatas probabilitas sebesar 0,504 ($P>0,05$) maka data dinyatakan normal.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variable independen dalam model regresi. Multikolonieritas terjadi jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variable dalam

fungsi linear. Dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variable.

Untuk mengetahui gejala multikolinieritas dapat dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolonieritas

Variable	VIF	1/VIF
Komite Audit (X1)	4,020	0,248
Kepemilikan Institusiona (X2)	20,990	0,047
Kepemilikan Manajemen (X3)	23,250	0.043
Komisariiss Independen (X4)	11,350	0.088
Mean VIF: 14,900		

Sumber: Data Diolah

Dari data yang dipaparkan dapat terlihat bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai VIF lebih dari 10 kecuali pada variabel Komite Audit. Artinya ada hubungan antar variabel independen kecuali variabel Komite Audit. Nilai VIF dari masing-masing variabel yakni untuk variabel komite audit memiliki nilai VIF sebesar 4,020, untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai VIF sebesar 20,990, untuk variabel kepemilikan manajemen memiliki nilai VIF sebesar 23,250, dan untuk variabel komisaris independen memiliki nilai VIF sebesar 11,350.

Untuk mengatasi ini, maka estimasi model regresi dilakukan dengan menggunakan metode *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Dengan metode SUR ini akan menjadikan data tidak multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada beberapa cara untuk menguji apakah model regresi yang kita pakai lolos heteroskedastisitas. Dalam mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas penelitian yang kita pakai ini menggunakan *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test*. Ketentuan yang dipakai, jika nilai probabilitasnya tidak signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada masalah heteroskedastisitas.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

H₀: Constant variance

Variables: fitted values of y

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

$\chi^2 (1)$	= 2,540
Prob > χ^2	= 0,111

Sumber: Data Diolah

Dari output di atas dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Heteroskedastisitas. Hal ini karena probabilitas variabel lebih dari 0,050. Dimana nilai probabilitas memiliki nilai 0,111.

5. Uji Autokorelasi

Autokorelasi diartikan sebagai korelasi atau hubungan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ruang atau waktu dengan kesalahan pengganggu pada ruang atau waktu sebelumnya. Karena ketidakcukupan data maka, uji autokorelasi dalam penelitian ini diestimasi dengan model *General Least Square* (GLS). Dengan GLS otomatis autokorelasi menjadi tidak ada demikian juga dengan heteroskedastisitas.

Tabel 13. Hasil Uji Model GLS

$\chi^2 (4)$	= 295.230
Prob > χ^2	= 0.000

Sumber: Data Diolah

Karena probabilitas lebih kecil dari alpha ($0.000 < 0,050$) maka sudah tidak terdapat autokorelasi.

E. Uji Signifikansi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variable Y. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variable dependen.

Tabel 14. Hasil Uji R^2

R^2	0,875
Adjusted R^2	0,862

Sumber: Data Diolah

Dari data yang telah diolah didapatkan nilai R^2 adalah sebesar 0,875 dan Adjusted R^2 sebesar 0,865. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 0,875 atau 87% dan sisa dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

2. Uji Statistik t

Uji t dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 15. Hasil Uji t

y	Coef.	Std. Err.	t	P Value
X1	0,208	0,069	3,00	0.003
X2	-0,118	0,132	-0,90	0.370
X3	0,044	0,014	3,05	0.002
X4	0,390	0,127	3,07	0.002
cons	-0,278	0,147	-1,89	0.059

Sumber: Data Diolah

Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada pengaruh komite audit (X1) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,208 dengan probabilitas sebesar 0.003 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel komite audit (X1) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah anggota komite audit, akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh komite audit (X1) terhadap

kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

- b. Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,118 dengan probabilitas sebesar 0.370 ($p > 0,050$) yang berarti tidak ada pengaruh variabel kepemilikan institusional (X2) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Karena pengaruh yang diberikan tidaklah signifikan disebabkan probabilitas value lebih besar dari pada 0,050. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) ditolak.

- c. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,044 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

besar persentase kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen, akan meningkatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

- d. Hipotesis keempat menyatakan bahwa ada pengaruh komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,390 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak jumlah anggota komisaris indepenen yang beada dalam perusahaan, akan meningkatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

3. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

Tabel 16. Hasil Uji F

F Hitung	= 65.020
Probabilitas	= 0.000

Sumber: Data Diolah

- a. Hipotesis kelima menyatakan bahwa ada pengaruh komite audit (X1), kepemilikan institusional (X2), kepemilikan manajemen (X3), dan komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari perhitungan yang tertera, karena probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,050 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan ada pengaruh komite audit (X1), kepemilikan institusional (X2), kepemilikan manajemen (X3), dan komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

F. Pembahasan

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada pengaruh positif komite audit (X1) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,208 dengan probabilitas sebesar 0.003 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel komite audit (X1) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah anggota komite audit, akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh komite audit (X1) terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

Hasil ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sherly (2013) bahwa keberadaan komite audit berhubungan dengan pelaporan keuangan yang terpercaya, seperti mengurangi kesalahan, dan faktor-faktor yang menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang terpercaya. Komite audit akan mendorong manajemen mengungkapkan informasi lebih banyak kepada publik.

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada pengaruh positif kepemilikan institusional (X2) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,118 dengan probabilitas sebesar 0.370 ($p > 0,05$) yang berarti tidak ada pengaruh variabel kepemilikan institusional (X2) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Karena pengaruh yang diberikan tidaklah signifikan disebabkan probabilitas value lebih besar dari pada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh kepemilikan institusional (X2) terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori bahwa semakin besar tingkat kepemilikan yang dimiliki institusi maka akan semakin baik pula informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heni Werdhi (2014) yang menyatakan bahwa adanya konsentrasi kepemilikan dengan hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu seperti keluarga, institusi, atau pemerintah dapat menimbulkan masalah agensi, yaitu adanya pergeseran konflik keagenan. Jika semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki institusi, akan mendorong adanya *make up*

laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya agar terlihat bahwa kinerja perusahaan baik.

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,044 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen, akan meningkatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh kepemilikan manajemen (X3) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

Hasil yang didapat sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Grosfeld (2006) dalam Heni Werdhi (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan ekuitas manajemen adalah upaya peningkatan manajerial dan penurunan prasyarat konsumsi, seharusnya mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik dan mendorong

manajer untuk mengungkap kinerja perusahaan berupa informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam laporan keuangan.

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa ada pengaruh komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,390 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,050$) yang berarti ada pengaruh variabel komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak jumlah anggota komisaris independen yang berada dalam perusahaan, akan meningkatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2009) dalam Risky Hafiz (2013) yang menyatakan komisaris independen diharapkan akan menjadi penggerak *good corporate governance*. Dan semakin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin berkualitas karena peningkatan proporsi komisaris independen

menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution; 2007)

5. Hipotesis kelima menyatakan bahwa ada pengaruh komite audit (X1), kepemilikan institusional (X2), kepemilikan manajemen (X3), dan komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y).

Dari perhitungan yang tertera, karena probabilitas sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,050 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan ada pengaruh komite audit (X1), kepemilikan institusional (X2), kepemilikan manajemen (X3), dan komisaris independen (X4) terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 (Y) diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016, dengan menggunakan teknik analisis regresi panel/PLS menyimpulkan bahwa:

1. Komite audit berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,208 dengan probabilitas sebesar 0.003 ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh positif signifikan variabel komite audit terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama ditolak. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,118 dengan probabilitas sebesar 0.370 ($p > 0,05$) yang berarti tidak ada

pengaruh variabel kepemilikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015.

3. Kepemilikan manajemen berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,044 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh variabel kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015.
4. Komisaris independen berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,390 dengan probabilitas sebesar 0.002 ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh variabel komisaris independen terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015.
5. Komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan PSAK No 7 tahun 2015 pada perusahaan industri sektor utama. Dari perhitungan yang tertera, karena probabilitas sebesar 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05 maka

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap dependen.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini terbatas pada pengujian mengenai beberapa unsur *Corporate Governance* yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015. Ada banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 2015, namun dalam penelitian ini hanya melibatkan 4 (empat) variabel independen yaitu Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, dan Komisaris Independen.
2. Penelitian hanya menggunakan data perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI, sehingga generalisasi hasil penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor utama yang menjadi anggota perusahaan pada sektor utama.
3. Penelitian yang digunakan selama 2 periode yaitu dari tahun 2015-2016.

4. Laporan keuangan masing-masing perusahaan memiliki metode dan kebijakan akuntansi yang berbeda, sehingga data yang diperoleh sulit untuk diperbandingkan.

C. Saran

Saran bagi pemerintah:

1. Pemerintah melalui OJK dapat terus mendorong tingkat pengungkapan RPT untuk lebih baik lagi karena dapat mendukung transparansi laporan keuangan.
2. Pemerintah melalui OJK dapat meningkatkan kualitas praktik *corporate governance* perusahaan agar hak dan kesetaraan pemegang saham dapat diterima dengan adil antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Saran bagi manajemen:

1. Keberhasilan dalam perwujudan prinsip *corporate governance* memerlukan kerjasama yang baik antar pihak manajemen dan *stakeholder*. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik guna memenuhi prinsip *corporate governance*.

Saran bagi investor:

1. Investor harus lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya karena dapat mendorong penyalahgunaan transaksi pihak berelasi.

REFERENSI

- Alvionita, I. & Taqwa, S. (2015). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Azwari, Peny Dan Raden Fatah. 2016. *Masalah Keagenan Pada Struktur Kepemilikan Perusahaan Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Publikasi: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Bukhori, Iqbal Dan Raharja. 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Publikasi: Diponegoro Journal Of Accounting
- Desianti Dan Udi Pramiudi. 2016. *Analisis Penerapan Psak 7 Dalam Pengungkapan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi Terkait Entitas Asosiasi Pada Perusahaan Go Public*. Naskah Publikasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan corporate governance (Tata Kelola Perusahaan)*. JilidII. FCGI. Edisi ke-2
- Ferdinal,Ferry. *Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela Dengan Efektifitas Dewan Komisars dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*. 2012. Skripsi: Universitas Indonesia
- Fitri, Dian. 2012. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Dengan Efektifitas Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi*. Naskah Publikasi: Universitas Indonesia
- Ghozali, Imam. 2006. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Pustaka Setia
- Guing, Aaron Dan Aria Farahmita. 2011. *Manajemen Laba Dan Tunneling Melalui Transaksi Pihak Istimewa Di Sekitar Penawaran Saham Perdana*. Jurnal Publikasi: Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Gunawan, Barbara Dan Hendrawati. *Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS*. 2015. Jurnal: Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia
- Hafiz M, Adriani. 2014. *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi Ifrs Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif*. Jurnal: Universitas Lambung Mangkurat

- Handayani, Indah Rini. 2014. *Analisis Pengaruh Pembelian Dan Penjualan Kepada Pihak Yang Berelasi Dan Tidak Berelasi Terhadap Laba Bersih Pada Industri Otomotif Dan Komponennya*. Jurnal Publikasi: Jurnal Mix, Volume IV No. 1
- IAI. 2017. PSAK No 7 Tahun 2015 diakses melalui <http://iaiglobal.or.id> pada 22 Desember 2017
- Jenang, Fransiska Dan Sri Lestari. 2013. *Pengaruh Transaksi Pihak-Pihak Istimewa Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Naskah Publikasi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta
- Marliasiwi, Juniar Anes. 2012. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS Di Indonesia Dan Malaysia*. Naskah Publikasi Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Praktik Good Corporate Governance Terkait Struktur Kepemilikan Perusahaan Di Indonesia* diakses melalui www.kompasiana.com pada 22 Desember 2017
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory In The Accounting Perspective)*. Jurnal Publikasi: Pena Fokus Ekonomi.
- Sari, Ratna Candra & Sugiharto. 2014. *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawan, Budi. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Naskah Publikasi: Universitas Pamulang.
- Silviana, Laurent. 2012. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Transaksi Pihak Yang Berelasi Terhadap Daya Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI*. Jurnal Publikasi: Berkala Jurnal Mahasiswa Akuntansi.
- Sirait, Immanuel. 2013. *Analisis Pengaruh Perusahaan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Risiko Idiosyncratic*. Jurnal Publikasi: Universitas Indonesia.

- Supriyono, E., Mustaqim, A. B. & Suhardjono, D. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia*. Simposiun Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok.
- Tobing, Adil dan rekan. 2013. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia*. Jurnal Publikasi: Institut Pertanian Bogor.
- Transaksi Hubungan Istimewa Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan* diakses melalui www.researchgate.net pada 22 Desember 2017.
- Utama, Cynthia A. 2015. *Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan* (Unpublished Undergraduate Thesis). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*.
- Utami, Wulan Dan Djoko Suhardjanto. 2011. *Investigasi Dalam Konvergensi Ifrs Di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme Corporate Governance*. Jurnal Publikas: Universitas Sebelas Maret
- Werdhi, Heni. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Di Indonesia*. 2015. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Widarto. 2013. *Penelitian Expo Facto*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulan, sari. 2013. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Disclosure*. Skripsi Publikasi: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Suhardjanto, Dan Rena Rukmit. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Jurnal: Universitas Sebelas Maret.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Penilaian Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

No	Instrumen	Ya	Tidak
1	Sifat hubungan dengan pihak berelasi		
2	Kompensasi personil manajemen		
3	Kategori imbalan kerja jangka pendek		
4	Imbalan pasca kerja		
	Imbalan jangka panjang lain		
	Pesangon pemutusan kontrak kerja		
	Pembayaran berbasis saham		
4	Jumlah transaksi		
5	Jumlah saldo (termasuk komitmen, syarat dan ketentuan, rincian jaminan)		
6	Penyisihan piutang ragu-ragu		
7	Beban dalam hal piutang ragu-ragu		

Lampiran 2. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Perusahaan
1	BWPT	Eagle High Plantationn Tbk
2	DSNG	Darma Satya Nusantara Tbk
3	GZCO	Gozco Plantation Tbk
4	JAWA	Jaya Agro Watie Tbk
5	PALM	Provident Agro Tbk
6	CPRO	Central Protenaprima Tbk
7	DSFI	Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
8	ADRO	Adaro Energi Tbk
9	ARII	Atlas Resources Tbk
10	BSSR	Baramukti Suksessarana Tbk
11	BYAN	Bayan Resources
12	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
13	ENRG	Energi Mega Prasada
14	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk
15	CTTH	Citatah Tbk
16	MITI	Mitra Investindo Tbk
17	SIMP	Salim Ivomas Pratama
18	TBLA	Tunas Baru Lampung
19	HRUM	Harum Energy
20	ITMG	Indo Tambangraya Megah
21	KKGI	Resources Alam Indonesia

Lampiran 3. Hasil Data Olahan Perusahaan Sampel tahun 2015

Kode	Nama Perusahaan	Mana	Insti	Inde	Komit	Pengung
BWPT	eagle high plantationn tbk	0,0021	65,53	40%	3	70%
DSNG	darma satya nusantara tbk	10,67	55,01	33%	3	80%
GZCO	gozco plantation tbk	5,51	62,58	25%	3	50%
JAWA	jaya agro watie tbk	0,46	75,58	33%	3	80%
PALM	provident agro tbk	0,25	88,32	50%	3	50%
CPRO	central protenaprima tbk	0,015	62,04	33%	3	50%
	dharma samudera fishing					
DSFI	industries tbk	0,09	74,03	50%	0	50%
ADRO	adaro energi tbk	13,19	43,91	40%	3	70%
ARII	atlas resources tbk	21,8	52,99	33%	2	60%
	baramukti suksessarana					
BSSR	tbk	0,98	26	33%	3	50%
BYAN	bayan resources	13,42	30	40%	3	50%
DOID	delta dunia makmur tbk	0,081	39,435	57%	3	80%
ENRG	energi mega prasada	0,0035	28,84	50%	3	60%
MDKA	merdeka copper gold tbk	6,8	68,1	40%	3	50%
CTTH	titatah tbk	6,57	52,22	33%	3	60%
MITI	mitra investindo tbk	0,19	57,66	20%	3	60%
SIMP	salim ivomas pratama	0,001	79,99	33%	3	60%
TBLA	tunas baru lampung	0,08	54,29	33%	3	60%
HRUM	harum energy	0,14	71,135	33%	3	50%
ITMG	indo tambangraya megah	0,01	60,1	40%	4	70%
KKGI	resources alam indonesia	0,34	67,31	40%	3	60%

Sumber: Idx 2015 Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Diolah

Lampiran 4. Data Perusahaan Sampel tahun 2016

Kode	Nama Perusahaan	Mana	Insti	Inde	Komite	Pengung
BWPT	eagle high plantationn tbk	0,01	69,08	50%	3	60%
DSNG	darma satya nusantara tbk	10,59	55,02	38%	3	80%
GZCO	gozco plantation tbk	5,04	62,58	25%	3	50%
JAWA	jaya agro watie tbk	0,46	70,51	33%	3	80%
PALM	provident agro tbk	0,25	88,32	50%	3	50%
CPRO	central protenaprima tbk	0,002	56,78	40%	3	50%
	dharma samudera fishing					
DSFI	industries tbk	0,09	74,03	50%	0	50%
ADRO	adaro energi tbk	13,32	43,91	40%	3	70%
ARII	atlas resources tbk	20,54	52,99	33%	3	60%
	baramukti suksessarana					
BSSR	tbk	0,18	90,7	33%	3	50%
BYAN	bayan resources	13,42	30	40%	4	50%
DOID	delta dunia makmur tbk	0,26	39,2	57%	3	80%
ENRG	energi mega prasada	0,035	31,9	50%	3	60%
MDKA	merdeka copper gold tbk	6,8	75,7	50%	3	50%
CTTH	titatah tbk	6,56	51,91	33%	3	60%
MITI	mitra investindo tbk	0,98	57,66	20%	2	60%
SIMP	salim ivomas pratama	0,001	80,14	33%	3	60%
TBLA	tunas baru lampung	0,08	51,25	33%	3	60%
HRUM	harum energy	0,014	73,697	33%	3	50%
ITMG	indo tambangraya megah	0,01	65,14	40%	4	70%
KKGI	resources alam indonesia	0,34	67,31	40%	3	60%

Sumber: Idx 2016 Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Diolah

Lampiran 5. Data Rangkuman

Thn	Id	Y	x1	x2	x3	x4
2015	1	0,7	0,000001	0,6553	0,000021	0,4
2016	1	0,8	1,098612	0,5501	0,1067	0,33
2015	2	0,5	0,000001	0,6258	0,0551	0,25
2016	2	0,8	1,098612	0,7558	0,0046	0,33
2015	3	0,5	0,693147	0,8832	0,0025	0,5
2016	3	0,5	1,098612	0,6204	0,00015	0,33
2015	4	0,5	0,693147	0,7403	0,0009	0,5
2016	4	0,7	1,098612	0,4391	0,1319	0,4
2015	5	0,6	1,098612	0,5299	0,218	0,33
2016	5	0,5	1,098612	0,26	0,0098	0,33
2015	6	0,5	1,098612	0,3	0,1342	0,4
2016	6	0,8	1,098612	0,39435	0,00081	0,57
2015	7	0,6	1,098612	0,2884	0,000035	0,5
2016	7	0,5	1,098612	0,681	0,068	0,4
2015	8	0,6	1,098612	0,5222	0,0657	0,33
2016	8	0,6	1,098612	0,5766	0,0019	0,2
2015	9	0,6	1,098612	0,7999	0,00001	0,33
2016	9	0,6	1,098612	0,5429	0,0008	0,33
2015	10	0,5	1,098612	0,71135	0,0014	0,33
2016	10	0,7	1,098612	0,601	0,0001	0,4
2015	11	0,6	1,098612	0,6731	0,0034	0,4
2016	11	0,7	1,098612	0,6908	0,0001	0,5
2015	12	0,8	1,098612	0,5502	0,1059	0,38
2016	12	0,5	1,098612	0,6258	0,0504	0,25
2015	13	0,8	1,098612	0,7051	0,0046	0,33
2016	13	0,5	1,098612	0,8832	0,0025	0,5
2015	14	0,5	1,098612	0,5678	0,00002	0,4
2016	14	0,5	1,098612	0,7403	0,0009	0,5
2015	15	0,7	1,098612	0,4391	0,1332	0,4
2016	15	0,6	1,098612	0,5299	0,2054	0,33
2015	16	0,5	1,098612	0,907	0,0018	0,33
2016	16	0,5	1,098612	0,3	0,1342	0,4
2015	17	0,8	1,098612	0,392	0,0026	0,57
2016	17	0,6	1,098612	0,319	0,00035	0,5
2015	18	0,5	1,098612	0,757	0,068	0,5
2016	18	0,6	1,098612	0,5191	0,0656	0,33
2015	19	0,6	1,098612	0,5766	0,0098	0,2
2016	19	0,6	1,386294	0,8014	0,00001	0,33

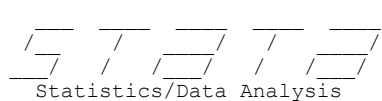
2015	20	0,6	1,098612	0,5125	0,0008	0,33
2016	20	0,5	1,386294	0,73697	0,00014	0,33
2015	21	0,7	1,098612	0,6514	0,0001	0,4
2016	21	0,6	1,386294	0,6731	0,0034	0,4

Sumber : BEI tahun 2015-2016 diolah

Dimana :

y = Kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi
x1 = Komite audit
x2 = Kepemilikan institusional
x3 = Kepemilikan manajemen
x4 = Komisaris independen

Lampiran 6. Deskripsi Statistik dan Hasil Regresi Panel

 (R)
 14.2 Copyright 1985-2015 StataCorp LLC
 StataCorp
 4905 Lakeway Drive
 College Station, Texas 77845 USA
 800-STATA-PC <http://www.stata.com>
 979-696-4600 stata@stata.com
 979-696-4601 (fax)

Single-user Stata perpetual license:
 Serial number: 10699393
 Licensed to: Andrey

Notes:

1. Unicode is supported; see help unicode_advice.

tsset id thn, yearly

panel variable: id (unbalanced)
 time variable: thn, 2015 to 2016
 delta: 1 years

xtsum

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations	
thn	overall	2015.5	.5060608	2015	2016	N =	42
	between		0	2015.5	2015.5	n =	21
	within		.5060608	2015	2016	T =	2
id	overall	11	6.128701	1	21	N =	42
	between		6.204837	1	21	n =	21
	within		0	11	11	T =	2
y	overall	.6047619	.1058125	.5	.8	N =	42
	between		.107127	.5	.8	n =	21
	within		0	.6047619	.6047619	T =	2
x1	overall	2.928571	.5584324	1	4	N =	42
	between		.5311712	1	4	n =	21
	within		.191273	2.428571	3.428571	T =	2
x2	overall	.5959279	.1672846	.26	.907	N =	42
	between		.1524239	.3	.8832	n =	21
	within		.072923	.2724279	.9194279	T =	2
x3	overall	.0379963	.0597901	.00001	.218	N =	42
	between		.0605004	.00001	.2117	n =	21
	within		.0019585	.0316963	.0442963	T =	2
x4	overall	.3833333	.0897059	.2	.57	N =	42
	between		.0889148	.2	.57	n =	21
	within		.0182797	.3333333	.4333333	T =	2

*Langkah pertama adalah melakukan uji Pooled Least Square (PLS),

```
reg y x1 x2 x3 x4
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	42
Model	1.02368067	4	.255920167	F(4, 37)	=	65.02
Residual	.145631628	37	.00393599	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.8755
				Adj R-squared	=	0.8620
Total	1.1693123	41	.028519812	Root MSE	=	.06274

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1	.2087983	.0741314	2.82	0.008	.0585938	.3590029
x2	-.1183215	.1406973	-0.84	0.406	-.4034013	.1667583
x3	.0444739	.0155406	2.86	0.007	.0129856	.0759622
x4	.3902254	.1353454	2.88	0.007	.1159896	.6644613
_cons	-.2788269	.1572637	-1.77	0.084	-.5974734	.0398195

*Uji Linieritas

```
. ovtest,rhs
(note: x1^3 dropped because of collinearity)
```

Ramsey RESET test using powers of the independent variables

Ho: model has no omitted variables

F(11, 26) = 1.74

Prob > F = 0.1202

*uji normalitas

```
predict r,resid
(1 missing value generated)
```

```
swilk r
```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
r	42	0.97576	0.995	-0.011	0.50431

*uji multicolinieritas

```
cor x1 x2 x3 x4
(obs=42)
```

	x1	x2	x3	x4
x1	1.0000			
x2	-0.7254	1.0000		
x3	-0.6082	0.9591	1.0000	
x4	-0.7625	0.9224	0.9196	1.0000

vif

Variable	VIF	1/VIF
x3	23.25	0.043005
x2	20.99	0.047651
x4	11.35	0.088140
x1	4.02	0.248566
Mean VIF	14.90	

*uji heteroskedastisitas

```
quietly reg y x1 x2 x3 x4
hettest
```

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of y

```
chi2(1)      =      2.54
Prob > chi2   =    0.1111
```

Pemilihan Model

*random effect

```
xtreg y x1 x2 x3 x4
```

Random-effects GLS regression
Group variable: id

```
Number of obs      =      42
Number of groups   =      21
```

R-sq:

```
within  = 0.9711
between = 0.6571
overall = 0.8708
```

Obs per group:

```
min =      2
avg  =     2.0
max  =      2
```

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

```
Wald chi2(4)      =    557.82
Prob > chi2       =    0.0000
```

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.20271	.0574934	3.53	0.000	.0900249	.315395
x2	-.2290121	.0956832	-2.39	0.017	-.4165476	-.0414765
x3	.0469581	.0105355	4.46	0.000	.0263089	.0676073
x4	.4778783	.0944382	5.06	0.000	.2927828	.6629738
_cons	-.3111035	.1149475	-2.71	0.007	-.5363963	-.0858106
sigma_u	.04395991					
sigma_e	.03627379					
rho	.59492551	(fraction of variance due to u_i)				

*fix effect

xtreg y x1 x2 x3 x4, fe

```

Fixed-effects (within) regression           Number of obs   =          42
Group variable: id                         Number of groups =          21

R-sq:                                     Obs per group:
    within = 0.9723                               min =          2
    between = 0.6362                              avg  =         2.0
    overall = 0.8647                               max  =          2

                                           F(4,17)         =       149.00
corr(u_i, Xb) = 0.0778                     Prob > F         =       0.0000

```

	y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
x1		.2051257	.0608329	3.37	0.004	.0767794	.3334719
x2		-.2761398	.0938033	-2.94	0.009	-.4740474	-.0782322
x3		.0469722	.0103927	4.52	0.000	.0250454	.068899
x4		.5279502	.0936847	5.64	0.000	.3302929	.7256075
_cons		-.336604	.1173364	-2.87	0.011	-.5841622	-.0890458
sigma_u		.05843969					
sigma_e		.03627379					
rho		.7218787	(fraction of variance due to u_i)				
F test that all u_i=0: F(20, 17) = 4.68						Prob > F = 0.0011	

*uji Chow Untuk mengetahui PLS Atau FE : $P < 0,05$ maka FE

```

estimates store fe
estimates store re
estimates store ols
estimates table fe re ols, star stats(N r2 r2_a)

```

Variable	fe	re	ols
x1	.20512569**	.20512569**	.20512569**
x2	-.27613982**	-.27613982**	-.27613982**
x3	.04697219***	.04697219***	.04697219***
x4	.52795021***	.52795021***	.52795021***
_cons	-.33660397*	-.33660397*	-.33660397*
N	42	42	42
r2	.97226761	.97226761	.97226761
r2_a	.933116	.933116	.933116

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

* Uji LM (apakah RE atau PLS) *Prob chi < 0,05 maka RE

xtreg y x1 x2 x3 x4, re

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =       42
Group variable: id                     Number of groups  =       21

R-sq:                                Obs per group:
    within = 0.9711                    min =          2
    between = 0.6571                    avg =         2.0
    overall = 0.8708                    max =          2

corr(u_i, X) = 0 (assumed)             Wald chi2(4)      =    557.82
                                         Prob > chi2       =    0.0000
```

	y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	x1	.20271	.0574934	3.53	0.000	.0900249	.315395
	x2	-.2290121	.0956832	-2.39	0.017	-.4165476	-.0414765
	x3	.0469581	.0105355	4.46	0.000	.0263089	.0676073
	x4	.4778783	.0944382	5.06	0.000	.2927828	.6629738
	_cons	-.3111035	.1149475	-2.71	0.007	-.5363963	-.0858106
	sigma_u	.04395991					
	sigma_e	.03627379					
	rho	.59492551	(fraction of variance due to u_i)				

xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

y[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Estimated results:

		Var	sd = sqrt(Var)
	y	.0285198	.1688781
	e	.0013158	.0362738
	u	.0019325	.0439599

Test: Var(u) = 0

chibar2(01) = 6.85
Prob > chibar2 = 0.0044

*uji hausman (untuk mengetahui Fe atau Re)
bila hasil P Value (Prob>Chi2)<Alpha 0,05 hasil terbaik FE, bila sebaliknya maka RE

```
quietly xtreg y x1 x2 x3 x4, fe
estimates store fe
quietly xtreg y x1 x2 x3 x4, re
estimates store re
```

```
hausman fe re
```

---- Coefficients ----				
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
x1	.2051257	.20271	.0024157	.0198784
x2	-.2761398	-.2290121	-.0471278	.
x3	.0469722	.0469581	.0000141	.
x4	.5279502	.4778783	.0500719	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = -37.40
 chi2<0 ==> model fitted on these
 data fails to meet the asymptotic
 assumptions of the Hausman test;
 see suest for a generalized test

```
regresi tanpa penyakit
```

```
xtgls y x1 x2 x3 x4
Cross-sectional time-series FGLS regression
```

Coefficients: generalized least squares
 Panels: homoskedastic
 Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances	=	1	Number of obs	=	42
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	21
Estimated coefficients	=	5	Time periods	=	2
			Wald chi2(4)	=	295.23
Log likelihood	=	59.35582	Prob > chi2	=	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.2087983	.0695791	3.00	0.003	.0724258	.3451708
x2	-.1183215	.1320572	-0.90	0.370	-.3771487	.1405058
x3	.0444739	.0145863	3.05	0.002	.0158853	.0730625
x4	.3902254	.1270339	3.07	0.002	.1412435	.6392074
_cons	-.2788269	.1476062	-1.89	0.059	-.5681298	.0104759

```
sureg y x1 x2 x3 x4
```

```
Seemingly unrelated regression
```

Equation	Obs	Parms	RMSE	"R-sq"	chi2	P
y	42	4	.0588848	0.8755	295.23	0.0000

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
y						
x1	.2087983	.0695791	3.00	0.003	.0724258	.3451708
x2	-.1183215	.1320572	-0.90	0.370	-.3771487	.1405058
x3	.0444739	.0145863	3.05	0.002	.0158853	.0730625
x4	.3902254	.1270339	3.07	0.002	.1412435	.6392074
_cons	-.2788269	.1476062	-1.89	0.059	-.5681298	.0104759

```
end of do-file
```

Lampiran 7. PSAK No 7